

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Brexit atau Britanian Exit merupakan suatu referendum yang dikeluarkan oleh Inggris agar rakyatnya dapat memutuskan apakah Inggris harus keluar atau tetap menjadi bagian dari Uni Eropa (Adam, 2020). Brexit ini pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri termuda kedua Inggris yakni David Cameron pada 2010, beliau membentuk koalisi dengan Liberal Demokrat, dalam pidatonya setelah resmi ditetapkan sebagai perdana menteri, Cameron memaparkan alasannya membentuk koalisi antara partai Konservatif dan Liberal Demokrat karena negara memiliki parlemen gantung, dimana tidak ada satu partaipun memiliki mayoritas, defisit negara yang lumayan besar dan masalah sosial yang mendalam dan adanya sistem politik yang harus diperbaharui. Cameron tampak ambisius dan pragmatis, dengan jejak oportuniste (bbc, 2010)

Cameron ingin mengembalikan jumlah konsesi yang berlebihan yang dibuat oleh pendahulunya yakni Partai Buruh. Cameron mengemukakan bahwasanya Uni Eropa membuat negara-negara dibawahnya terlalu dipersempit, kurang birokratis, lebih antar pemerintah, kurang memiliki keseragaman antar negara, dan dia ingin mengakhiri arahan Uni Eropa dan peraturan mentransformasi hukum negaranya dan memaksa pengadilan Inggris untuk mengamati norma-norma yang asing dengan tradisi Inggris. Cameron mencoba menangkis tekanan yang meningkat dari partainya sendiri dengan memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan semua pemerintah di masa depan untuk mengadakan referendum sebelum pemindahan kompetensi nasional lebih lanjut kedalam Uni Eropa.

Referendum Brexit merupakan sebuah janji dari Perdana Menteri David Cameron apabila terpilih kembali pada pemilihan umum di tahun 2015, ditambah dengan adanya desakan dari anggota partainya sendiri, yakni Partai Konservatif, dan partai sayap kanan anti-imigrasi Inggris (UKIP), yang memproklamkan bahwasanya rakyat Inggris tidak pernah lagi menjadi bagian dari penyampaian

aspirasi secara langsung sejak tahun 1975 (Armandhanu, 2016). Salah satu alasan utama yang mendorong Inggris memutuskan untuk menanggalkan keanggotanya dari Uni Eropa yaitu karena Inggris menilai peraturan yang diterapkan oleh Uni Eropa di sektor integrasi kawasan Eropa bagi negara-negara anggotanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana hal ini dapat dijelaskan melalui kritik pandangan “state centric” terhadap integrasi kawasan, bahwa negara tetap menjadi pengendali utama dalam membentuk, memutuskan sampai mengelola strategi pemerintahan dan hubungan dengan negara lain (Saviar, 2016). Namun, Inggris menilai bahwa Uni Eropa memegang kendali penuh dan Uni Eropa seolah tidak membiarkan masing-masing negara anggotanya mengurus urusan rumah tangga negaranya masing-masing. (Petrikor Immanuel, 2016).

Inggris mengadakan voting pertama kali untuk memberikan suara masyarakat “Haruskah Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa atau meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2016”. Dari voting tersebut menghasilkan selisih 51,9% hingga 48,1% suara yang menyatakan bahwa “Inggris menarik diri dari Uni Eropa adalah yang terbaik”. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa adalah kejutan dari kebijakan utama, dengan konsekuensi yang tidak diketahui. Tetapi tidak diketahui tidak berarti tidak dapat diprediksi. Kemungkinan konsekuensi Brexit dapat berpengaruh terhadap perekonomian Inggris. Meskipun mereka memiliki fokus yang sama, mereka menggunakan strategi pemodelan yang berbeda, dan ada beberapa perbedaan yang signifikan dalam hasil yang diprediksi. Tapi itu adalah kekuatan simposium, bukan kelemahan (Milner, 2018).

Hubungan perekonomian yang terjalin antara Inggris dan Uni Eropa tentu sangatlah erat, terbukti dari naiknya nilai Produk Domestik Bruto per kapita Inggris selama menjadi anggota Uni Eropa. Inggris juga mendapatkan banyak kemudahan setelah bergabung dengan Uni Eropa, salah satunya adalah dengan adanya kebijakan pasar tunggal atau *single market* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, dimana negara-negara anggotanya bebas melakukan perdagangan tanpa adanya bea cukai.

Nilai dari investasi dan perdagangan Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa juga dinilai cukup tinggi dibandingkan dengan negara di luar Uni Eropa. Dengan adanya referendum Brexit ini, tentu akan mempengaruhi hubungan perekonomian kedua belah pihak, dimana nantinya Inggris juga akan kehilangan hak prerogatifnya sebagai bagian dari Uni Eropa. Dalam penelitian ini saya membahas tentang konsekuensi dari referendum Brexit terhadap stabilitas perekonomian Inggris yang menjadi main actor dalam problematika referendum Britanian Exit.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari bagaimana awal dari hubungan perekonomian Inggris dan Uni Eropa yang saling menguntungkan satu sama lain, maka muncul pertanyaan “ Apa dampak dari Referendum Britanian Exit( Brexit) terhadap stabilitas perekonomian Inggris pada tahun 2016-2020?”

## **C. Kerangka Teori**

Dalam menganalisa suatu kasus atau permasalahan tentu sangat diperlukan kerangka pemikiran sebagai suatu acuan. Teori merupakan suatu pendapat yang dasarnya dari sebuah penelitian atau penemuan yang nantinya dapat mejadi sumber informasi untuk kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi yang artinya teori juga menjadi dasar bagi prediksi. Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan Teori Interdependensi.

### ***Teori Interpendensi***

Teori Interdependensi atau teori saling ketergantungan merupakan sebuah teori dimana keadaan yang ditentukan atau dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan eksternal maupun internal antara dua pihak atau lebih. Saling ketergantungan pada dunia politik mengacu pada suatu situasi yang ditandai dengan adanya efek timbal balik di antara actor yang terlibat. Saling ketergantungan juga menimbulkan masalah klasik dari strategi politik maupun

ekonomi, dimana tindakan negara, dan aktor non-negara yang signifikan, akan membebankan biaya pada anggota lain yang masuk kedalam sistem.

Aktor yang terkena dampak ini akan menanggapi secara politis, apabila mereka memiliki kapasitas dalam upaya untuk menghindarinya beban penyesuaian yang dipaksakan kepada mereka. Masalah yang dihadapi masing-masing aktor adalah bagaimana memanfaatkan pertukaran internasional sambil mempertahankan otonomi sebanyak mungkin. Dari perspektif sistem internasional, masalahnya adalah bagaimana caranya menghasilkan dan memelihara pola kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang untuk menghadapi upaya bersaing oleh pemerintah maupun aktor non-pemerintah. (Nye, 1987)

Arti saling ketergantungan dalam ekonomi dibagi menjadi dua. Pertama, kondisi ekonomi suatu negara mempengaruhi kondisi perekonomian negara lain ketika negara tersebut berada dalam satu kelompok atau dalam satu benua, maka kelompok tersebut dianggap sebagai interdependence atau biasa disebut dengan sensitivitas interdependence. Pengertian kedua dari interdependence atau yang biasa disebut dengan kerentanan interdependence adalah apabila beberapa negara sulit dipisahkan karena setiap negara sangat bergantung satu sama lain. (Baldwin, 1980)

Menurut Mansfield dan Pollins, ada tiga tema konseptualisasi saling ketergantungan dalam perekonomian. Pertama, perbandingan perdagangan dengan total output ekonomi diukur dengan indikator keterbukaan. Jika pecahan dari total output ekonomi yang diekspor atau diimpor dalam jumlah yang besar ke berbagai sektor, maka hal itu akan sebanding dengan kemungkinan munculnya hambatan pada arus perdagangan yang mana hal ini akan berpengaruh pada stabilitas perekonomian negara yang bersangkutan.

Kedua, tingkat konsensus berdasarkan pengukuran yang tidak digunakan pada tingkatan yang lebih luas. Karena fakta bahwa mereka lebih cenderung menggunakan indikator asimetri perdagangan. Indikator semacam ini

dikembangkan dengan menggunakan porsi perdagangan seperti ekspor atau impor antar negara bagian saja.

Ketiga, tema perolehan ini sedikit berbeda dari yang lain. Tema ini tidak bergantung pada arus perdagangan, namun mengacu pada keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Satu-satunya cara untuk mengukur keuntungan hanya dengan menggunakan cara pengukuran tidak langsung karena kontrol kondisi kontrafaktual. Keuntungan dari perdagangan dan lancarnya arus perekonomian berkorelasi dengan ekspor atau impor maupun investasi internasional. Dalam hal ini keterbukaan menjadi salah satu yang paling banyak digunakan dalam literatur tentang interdependensi dan konflik daripada konseptualisasi utama lainnya. (Pollins, 2001)

Dua negara dapat diklasifikasikan sebagai interdependence jika kedua negara tersebut saling bergantung satu sama lain atau kedua negara mendapatkan benefit dari kerjasama yang mereka lakukan. Menurut Etel Solingen, di tingkat regional; hubungan silang nasional dapat dicetak dengan menciptakan koalisi antara domestik dengan preferensi internasionalis. Stabilitas koalisi dan politik dalam negeri dapat ditingkatkan dengan upaya koalisi internasionalis domestik (Pollins, Edward D. Mansfield dan Brian M., 2001).

Jadi pada penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan teori Interpendensi untuk dapat menjawab dampak dari adanya Brexit. Seperti yang kita ketahui Inggris menjadi bagian dari Uni Eropa sejak 1973, dimana beberapa kerja sama disepakati di beberapa sektor seperti ekonomi, politik dan keamanan yang mendukung kemajuan Uni Eropa maupun untuk Inggris sendiri. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya kerjasama ini tentu membuat kedua belah pihak saling ketergantungan. Dan dengan adanya Brexit ini akan menimbulkan beberapa perubahan ketika Inggris menghentikan keanggotaannya dari Uni Eropa, khususnya pada proses perdagangan Internasional Inggris-Uni Eropa, baik itu di bidang ekspor, impor maupun investasi asing, yang nantinya akan berpengaruh pada stabilitas perekonomiannya.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teori dan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, muncul hipotesis mengenai penelitian ini yaitu “Dampak dari Referendum Britanian Exit dalam mempengaruhi perekonomian Inggris ialah :

1. Penurunan Investasi
2. Penurunan Perdagangan ( Ekspor Dan Impor)
3. Penurunan Lapangan Kerja

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyelesaian suatu permasalahan di dalam suatu penelitian, hadirnya sebuah metode penelitian menjadi penting. Metode penelitian merupakan sebuah metode dalam mengumpulkan dan memperoleh data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian tersebut, baik data yang bersifat primer maupun sekunder. Data-data inilah yang kemudian dapat digunakan sebagai komponen yang diperlukan dalam menyusun sebuah penelitian dan menganalisa faktor-faktor yang saling berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan, sehingga akan terdapat suatu kebenaran dari data-data dan hasil yang akan diperoleh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan menelaah fokus kasus dan melihat faktor subjektif dari tingkah laku dari aktor serta mengumpulkan data, guna mengungkapkan pemaknaan objek terhadap suatu fenomena yang terjadi. Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data melalui data sekunder. Hal ini bersifat Studi Pustaka dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa data-data yang diperoleh melalui berbagai macam sumber yang mendukung penelitian yaitu literatur ilmu hubungan internasional baik itu buku, jurnal, artikel, surat kabar, ataupun

dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh aktor terlibat secara langsung dan berbagai sumber-sumber lain yang berbentuk dalam media elektronik (yang dapat diakses melalui internet). Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan argumentatif yang diharapkan dapat menggambarkan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang sudah dirumuskan.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Agar obyek penelitian menjadi jelas dan lebih spesifik serta memudahkan peneliti dalam pencarian data dan fakta untuk menjawab persoalan-persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis memberi batasan materi yang terfokus terhadap jalannya Referendum Brexit semenjak diajukan sampai disahkan dan bagaimana kaitanya dengan perekonomian saat ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam mewujudkan sebuah penulisan yang tersusun sistematis, penulis menyusun dan membagi penulisan skripsi ini menjadi empat bab yang masing-masing berisi tentang:

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, memaparkan tentang bagaimana keanggotaan Inggris di Uni Eropa, integrasi kedua belah pihak hingga terciptanya referendum Brexit.

BAB III, merupakan temuan dari hipotesa. Dimana pada bab ini akan dibahas tuntas mengenai perubahan apa saja yang terjadi pada perekonomian Inggris dari awal tercetusnya referendum Brexit hingga disahkan, yang nantinya akan berupa perbandingan yang berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian Inggris.

BAB IV, Berisikan kesimpulan dari temuan yang ada dalam pembahasan yakni Pengaruh Keputusan Referendum Brexit Terhadap Stabilitas Perekonomian Inggris Tahun 2016-2020.